

Sistem Pengendalian Internal Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kolaka

Fina Dwi Amanda*, La Ode Turi, Bustang
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka
e-mail: finadwiamanda@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal kas berfungsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara langsung dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait. Data kualitatif dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKPD Satpol PP Kabupaten Kolaka memiliki sistem pengendalian internal yang baik dengan pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Ini memungkinkan pelaksanaan pengendalian intern kas dengan efektif.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kas, SKPD Satpol PP

Abstract

The research aims to find out what the internal cash is control system. This research uses a qualitative method with data collection techniques in the form of documentation and direct interviews with related parties. The data reduction, data presentation and drawing conclusions. The result of this research are that the internal control system at the SKPD Satpol PP Kolaka Regency is good, seen from the clear and precise division of tasks, functions, authority and responsibilities so that the implementation of cash internal control can be carried out well.

Keywords: Internal Control System, Cash, SKPD Satpol PP

1. PENDAHULUAN

Semua bisnis, pemerintahan, dan lembaga lainnya menggunakan sistem informasi di era globalisasi saat ini. Sistem yang menerima data dan instruksi, mengolah data sesuai instruksi, dan mengeluarkan hasil disebut sistem informasi. Adanya sistem informasi akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Namun, data yang begitu kompleks membutuhkan sistem pengendalian internal yang kuat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan dasar yang teguh. Setiap lembaga pemerintah harus membuat dan menjaga lingkungan organisasi (lingkungan pengendalian) yang mendorong manajemen yang sehat.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*, pengendalian internal terdiri dari kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa catatan dan informasi akuntansi adalah akurat dan andal, untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan untuk mengevaluasi kesesuaian manajemen dengan kebijakan dan prosedur. Satuan Polisi Pamong Praja adalah organisasi pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertarikan dan ketertiban umum. Peraturan Daerah menetapkan organisasi, visi, misi, dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah SATPOL PP Kabupaten Kolaka, mereka harus

melakukan pengawasan menyeluruh untuk mencegah kesalahan dan kebocoran. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang efisien diperlukan untuk Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan kas oleh Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini sangat penting untuk melindungi kas dan memastikan catatan akuntansi atas kas akurat.

Sering kali, suatu sistem pengawasan kas internal akan membagi tugas pencatatan, pelaksanaan, dan penyimpanan. Jika tidak ada pemisahan fungsi seperti di atas, sistem informasi dan pengendalian kas dapat memberikan informasi tentang pengeluaran uang kas secara akurat dan tepat waktu tentang kondisi dan aliran kas, seperti jumlah uang di tangan, tagihan, pembayaran, dan perkiraan aliran kas dari pendapatan dan belanja. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sistem informasi yang memadai diperlukan, baik secara formal maupun informal.

Sebagian besar komponen sistem pengendalian internal kas telah diterapkan di SKPD Satpol PP Kabupaten Kolaka. Ini termasuk struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang bertanggung jawab. SKPD Satpol PP Kabupaten Kolaka telah mematuhi prinsip dan prosedur yang berlaku untuk sistem pengendalian internal kas. Namun penulis menemukan permasalahan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka yaitu belum sepenuhnya menerapkan prosedur sistem pengendalian internal kas.

Berdasarkan permasalahan yang melatar belakangi, studi berikut melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kolaka”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Pengendalian Internal

Setiap perusahaan harus menggunakan sistem untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal.

Menurut Mulyadi [1] sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal menurut Jason Scott [2] adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

2. Pengendalian Internal Kas

Penting bagi instansi atau perusahaan untuk melakukan pengendalian terhadap kas. Menurut Erhans [3] pengendalian internal kas yang umumnya ditempuh oleh instansi atau perusahaan, yaitu:

- a. Semua penerimaan uang harus dicatat dan segera disetorkan ke bank
- b. Membuat laporan kas harian dan secara berkala disediakan pencocokan antara fisik kas dengan saldo menurut catatan
- c. Semua pengeluaran kas harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang
- d. Semua pengeluaran kas yang jumlahnya relatif besar harus menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil
- e. Membentuk kas kecil untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil
- f. Harus dipisahkan antara petugas yang mencatat, menyimpan dan mengesahkan penerimaan uang
- g. Harus dipisahkan antara petugas yang menandatangani cek dengan petugas yang mencatat pengeluaran uang kas.

3. Sistem Pengendalian Internal Kas

Kas merupakan aset likuid yang mudah digunakan, banyak yang menginginkan sehingga mudah dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu entitas perlu merancang pengendalian internal yang baik agar kas perusahaan aman dan terlindungi. Perlindungan terhadap kas dapat berupa fisik maupun perlindungan untuk menjaga agar kas tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya.

Menurut Slamet [4] kas merupakan aset yang menjadi permulaan siklus operasi perusahaan.

Beberapa bentuk pengendalian terhadap kas misalnya sebagai berikut:

- a. Terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna dan pihak pembayar. Tingkat pemisahan tugas disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Pada entitas yang besar pemisahan tugas dilakukan dalam unit terpisah, namun dalam entitas kecil pemisahan tugas tidak dapat dilakukan secara ideal. Utamanya, harus ada kroscek dan control dari pihak lain, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.
- b. Penggunaan lemari besi (brankas) untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas.
- c. Penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda
- d. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain.
- e. Penerimaan kas melalui bank, untuk keamanan dan pengendalian pencatatan
- f. Penggunaan sistem imprest kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil
- g. Rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening.

Pada SKPD SATPOL PP Kabupaten Kolaka telah berlangsung proses pengendalian internal kas yang cukup baik seperti pemisahan tugas yang berbeda pada bendahara, penggunaan lemari besi untuk menyimpan kas, penggunaan rekening yang berbeda dalam pengeluaran dan pemasukan, dan setiap pengeluaran dan pemasukan telah dilakukan melalui bank agar mudah proses pencatatannya.

4. Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas

Fungsi penerimaan kas dikerjakan oleh pemegang kas dan pencatat pembukuan. Pemegang kas sebagai penerima uang dan penyetor uang juga sebagai pencatat penerimaan uang yang bekerja sama dengan pencatat pembukuan. Tugas rangkap

yang dikerjakan oleh pemegang kas ini memang dapat menimbulkan peluang bagi pemegang kas untuk melakukan penyelewengan.

Unsur pengendalian internal atas penerimaan kas yang sehat menurut Mulyadi [1] untuk organisasi, system otoritas dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat adalah :

1. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan
2. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi
3. Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan (*bilyet giro*)
4. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang disebut fungsi akuntansi
5. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi (bagian piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur
6. Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera
7. Para penagih dan kasir harus diasuransikan
8. Kas dalam perjalanan (baik yang berada di tangan kas maupun di tangan penagih perusahaan) diasuransikan (*case-in-safe* dan *case-in-transit insurance*).

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber penerimaan kas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka, yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas

Menurut Mulyadi [1] Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan

umum perusahaan. Dokumen – dokumen yang yang digunakan dalam pengeluaran kas dengan cek adalah :

- a. Bukti kas keluar
- b. Cek
- c. Permintaan cek

Pengendalian internal terhadap pengeluaran kas yang dilakukan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh bukti pengeluaran kas bank ditandatangani oleh pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas sebagai bukti bahwa pengeluaran kas diketahui dan disetujui
- b. Seluruh transaksi dibuatkan perincian secara menyeluruh
- c. Semua cek harus dibayar sesuai nomor, yang umumnya ditetapkan oleh bank
- d. Semua cek dan kuitansi yang keluar harus dipertanggungjawabkan oleh bagian keuangan.

6. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Kas

Menurut Mulyadi [1] unsur pokok sistem pengendalian internal kas adalah:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
- b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, Utang, pendapatan dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

7. Sistem

Menurut Sumarsan Thomas [5] sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut Marom [6] sistem adalah suatu jaringan dari

prosedur-prosedur yang disusun dalam rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi pokok dalam suatu badan usaha.

8. Pengendalian

Menurut T. Hani Handoko [7] pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut Malayu SP Hasibuan [8] pengendalian dapat juga diterjemahkan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

9. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Kas PP No. 60 Tahun 2008

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian

efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

10. Kas

Menurut Dwi Martani [9] kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Tidak ada standard akuntansi khusus terkait dengan kas namun secara umum dibahas dalam standard tentang instrument keuangan. Keberadaan kas dalam entitas sangat penting karena tanpa kas, aktivitas operasi perusahaan tidak dapat berjalan. Entitas tidak dapat membayar gaji, memenuhi utang yang jatuh tempo dan kewajiban lainnya. Entitas harus menjaga jumlah kas agar sesuai dengan kebutuhannya. Jika jumlah kas kurang, maka kegiatan operasional akan terganggu. Terlalu banyak kas, menyebabkan entitas tidak dapat memanfaatkan kas tersebut untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi.

IAI [10] kas dan setara kas menurut PSAK No. 2 menyatakan bahwa: "Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan." Menurut Jerry J. Weygandt kas terdiri dari koin, uang kertas, cek, wesel atau kiriman di tangan melalui pos yang lazim berbentuk draft bank atau cek bank, dan uang tunai ditangan atau simpanan di bank atau semacam deposito.

11. Tujuan Sistem Pengendalian Internal Kas

Menurut Dina Maghfirah [11] pada hakikatnya, organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak pada setiap manajemen. Jika manajemen puncak merasa bahwa pengendalian internal itu penting maka anggota dalam organisasi akan merasakan hal tersebut dan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dilain pihak, jika pengendalian internal tidak dijadikan kepentingan utama

manajemen puncak maka dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian internal tidak dapat dicapai dengan efektif.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Perangkat Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka yang terletak di Jl. Pendidikan No. 28, Laloeh, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif.

Informan Penelitian

Informan Dalam Penelitian Ini Yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program Perencanaan dan Bendahara Pengeluaran.

Jenis dan Sumber Data.

Data primer dari wawancara dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mencakup dua jenis metodologi pengumpulan data, yaitu:

- 1) Wawancara
- 2) Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Metodologi analisis data didasarkan pada kerangka kerja yang ditetapkan Miles dan Huberman [12], meliputi:

- 1) Reduksi Data (Data Reduction)
- 2) Penyajian Data (Data Display)
- 3) Penarikan Kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Terdapat beberapa prosedur pengendalian internal yang tidak dijalankan oleh instansi ini yang dapat dikatakan sebagai kelemahan. Mengenai sistem pengendalian internal kas yang ada di instansi ini adalah tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas.

Walaupun terdapat beberapa kelemahan terkait sistem pengendalian internal kas di instansi ini, namun instansi ini dapat menutupi semua kelemahan agar kecurangan dan penyelewengan terhadap kas tidak terjadi. Seperti sistem pengendalian internal yang

terdapat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka memiliki kekurangan atas unsur-unsur pengendalian yang ada, namun dilihat dari prosedur pengeluaran kasnya sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada sehingga kecil kemungkinan seseorang untuk melakukan penyelewengan terhadap kas instansi.

Berdasarkan wawancara penelitian ini, yaitu:

Kepala Sub Bagian Keuangan, menyatakan “Lingkungan pengendalian terkait dengan struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka telah mempunyai struktur organisasi yang jelas, namun dalam hal pemisahan fungsi kas instansi tidak menerapkan fungsi penerimaan kas yang ada hanya fungsi pengeluaran kas.”

Staff bagian keuangan, menyatakan “Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka adalah instansi yang rotasinya hanya untuk pengeluaran dan sumber dana juga hanya dari APBD jadi tidak perlu adanya fungsi penerimaan kas.”

Kepala Sub Bagian Program menyatakan “Pengawasan terhadap keuangan disini bukan auditor seperti halnya diperusahaan, tetapi inspektorat atau irjen. Tugas mereka memeriksa dokumen-dokumen atas transaksi-transaksi yang terjadi di instansi. Dan pengawasan umum pada instansi dilakukan langsung oleh pimpinan terhadap sub-sub bagian yang ada didalam instansi ini walaupun tidak selalu dilakukan”

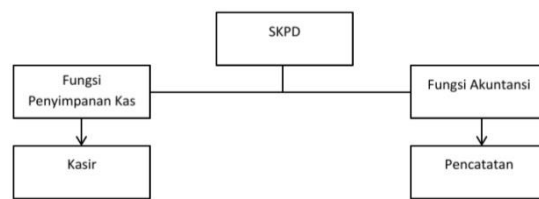
2. Pembahasan

Sistem Pengendalian Internal Kas ada SKPD pada Satpol PP Kabupaten Kolaka, meliputi:

1) Struktur Organisasi Yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas

- a. Dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.

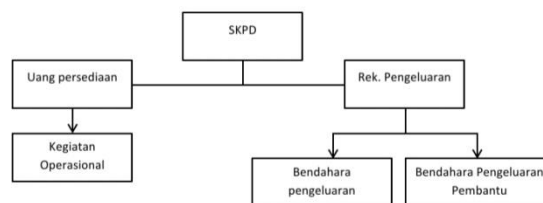
Pada SKPD Satpol PP Kabupaten Kolaka telah menerapkan unsur tersebut, dengan fungsi penyimpanan kas telah dipisahkan dari fungsi akuntansi dengan memberikan tanggung jawab fungsi penyimpanan kepada bagian kasir dan memberikan tanggung jawab pencatatan kepada bagian akuntansi.



Gambar 1 Struktur Organisasi Tanggung Jawab Fungsional

- b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

Transaksi pengeluaran kas telah sesuai karena transaksi pengeluaran kas tidak di laksanakan sendiri tetapi melibatkan lebih dari satu fungsi yaitu bendahara pengeluran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu.

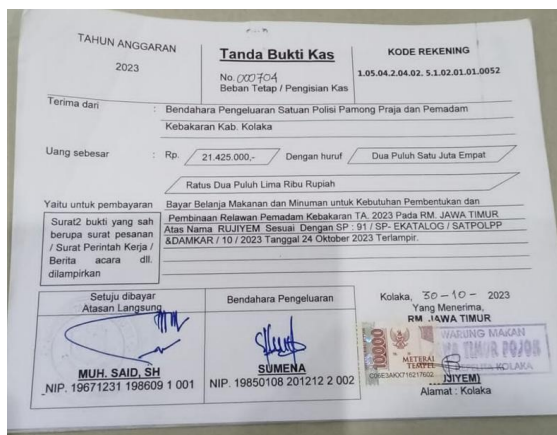


Gambar 2 Struktur Pengeluaran Kas pada Satpol PP Kabupaten Kolaka

2) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan

Transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas keluar ini kas perusahaan berkurang dan catatan akuntansi dimutakhirkan (*up dated*). Pada SKPD Satpol PP Kabupaten Kolaka sudah menerapkan unsur tersebut, bagian kasir akan mengeluarkan sejumlah uang apabila bukti pengeluaran kas telah diotorisasi dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Satuan, dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

Pada SKPD Satpol PP Kabupaten Kolaka sudah menerapkan unsur ini karena dalam pencatatan ke dalam catatan akuntansi di dasarkan pada bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.



Gambar 3 Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan Satpol PP Kabupaten Kolaka

3) Karyawan Yang Mutunya Sesuai Dengan Tanggung Jawab

Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya maka di adakan seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang di tuntutan oleh pekerjaannya dan pengembangan pendidikan karyawan selama karyawan perusahaan atau instansi, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Pada SKPD Satpol PP Kabupaten Kolaka memenuhi unsur ini karena telah melakukan seleksi terhadap calon karyawan. Kriteria yang digunakan dalam menyeleksi karyawan meliputi: interview berbasis perilaku, test kesehatan untuk memastikan calon pegawai fit atau tidak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan pada Satpol PP Kabupaten Kolaka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pada SKPD pada Satpol PP Kabupaten Kolaka telah menerapkan sebagian besar unsur-unsur sistem pengendalian internal kas yang terdiri dari struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta karyawan yang bertanggung jawab yang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pelaksanaan pengendalian internal kas dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2) Pada SKPD pada Satpol PP Kabupaten Kolaka mempunyai struktur organisasi yang baik karena terdapat pemisahan

tugas yang jelas dalam setiap bagian, dimana fungsi penyimpanan dilakukan oleh bagian keuangan dan pencatatan dilaksanakan oleh bagian akuntansi.

- 3) Pada SKPD pada Satpol PP Kabupaten Kolaka telah mengatur pembagian wewenang dalam pemberian otorisasi atas transaksi perusahaan dengan baik. Dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas yang terjadi mendapat otorisasi terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Satuan, dan Kasubag. Keuangan dengan tingkat ketelitian dan keakuratan yang tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan perusahaan.
- 4) Pada SKPD pada Satpol PP Kabupaten Kolaka Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya telah dilaksanakan Pada SKPD Satpol PP Kabupaten Kolaka, karena perusahaan telah melakukan seleksi terhadap calon karyawan, dan pengembangan karyawan dengan pelatihan dan pendidikan tahunan.

6. SARAN

Peneliti dapat memberikan saran-saran berikut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada SKPD pada Satpol PP Kabupaten Kolaka:

1. Bagi SKPD pada Satpol PP Kabupaten Kolaka
 - a. SKPD pada Satpol PP Kabupaten Kolaka diharapkan dapat meningkatkan pengendalian internal kas yang lebih efektif agar apa yang dimiliki oleh instansi bisa tersimpan dengan aman tanpa adanya penyalahgunaan dan kecurangan dengan cara menciptakan pengawasan dan evaluasi yang rutin atau secara berkala baik prosedur pengeluaran kasnya.
 - b. Diharapkan setiap rotasi pekerjaan dilaksanakan tepat waktu sesuai rutinitas yang diterapkan instansi agar setiap transaksi pengeluaran kas

langsung dicatat sesuai tanggal terjadinya transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Mulyadi, “Sistem Akuntansi, Cetakan Keempat,” *Jakarta: Salemba Empat*, 2014.
 - [2] J. Scott, A. P. Strickland, K. Warner, and P. Dawson, “Frequent callers to and users of emergency medical systems: a systematic review,” *Emerg. Med. J.*, vol. 31, no. 8, pp. 684–691, 2014.
 - [3] Erhans and Y. Junaedi, *Pengantar Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia: Perusahaan Jasa dan Dagang*. Jakarta: Ercontara Rajawali, 2000.
 - [4] S. S. Sodikin and R. BA, “Akuntansi Pengantar 1. kesembilan,” *Yogyakarta Sekol. Tinggi Ilmu Manaj. YKPN*, 2016.
 - [5] T. Sumarsan, “Sistem pengendalian manajemen.” Edisi, 2013.
 - [6] C. Marom and J. D. Herfan, *Sistem akuntansi perusahaan dagang*. Grasindo, 2000.
 - [7] B. Swastha and T. H. Handoko, “Manajemen pemasaran,” *Ed. Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta Penerbit Lib.*, 2002.
 - [8] M. S. P. Hasibuan, “Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah,” 2007.
 - [9] D. Martani, S. V. Siregar, R. Wardhani, A. Farahmita, E. Tanujaya, and T. Hidayat, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2*. Penerbit Salemba, 2024.
 - [10] I. A. Indonesia, “Exposure Draft Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan,” *Jakarta Ikat. Akuntan Indones.*, 2016.
 - [11] D. Maghfirah, “Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Bima Desa Sawita.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
 - [12] A. Huberman, “Qualitative data analysis a methods sourcebook,” 2014.
-